

Penguatan Identitas Nasional Indonesia melalui Pendidikan Multikultural Berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Era Globalisasi

Strengthening Indonesia's National Identity through Multicultural Education Based on Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika in the Era of Globalization

Salfira Az Zahra*¹.

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

*Korespondensi: E-Mail: salfira.az25@mhs.uinjkt.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Vol. 1, No. 2. (2025) UIN Law Review Hal. 156-176.</p> <p>Diajukan: 30-09-2025 Ditelaah: 02-10-2025 Direvisi: 15-10-2025 Diterima: 25-10-2025</p> <p>Handling editor:</p> <p>Key Words: Globalization; Indonesian citizenship; multicultural education; National identity; Pancasila education.</p> <p>Kata Kunci: Globalisasi; Identitas nasional; pendidikan Pancasila; pendidikan multikultural; warga negara Indonesia.</p>	<p>Globalization and rapid digital transformation have significantly influenced the dynamics of Indonesia's multicultural society. The massive flow of global culture, identity fragmentation, and increasing social polarization pose serious challenges to the internalization of national values and the strengthening of national identity among Indonesian citizens. The main problem addressed in this study concerns how national identity can be strengthened through Pancasila education and multicultural education, and whether Indonesian citizens are able to maintain their national identity amid global changes. This study raises two research questions: (1) how do Pancasila education and multiculturalism contribute to strengthening national identity, (2) to what extent are the outcomes of national identity strengthening reflected in the attitudes and behaviors of Indonesian citizens. This research employs a qualitative approach using library research by critically analyzing academic books, peer-reviewed journal articles, and relevant scholarly sources. The findings reveal that strengthening national identity among Indonesian citizens is fundamentally achievable, but it does not occur automatically. Its success depends largely on contextual, dialogical, and inclusive educational approaches, as well as the support of public policies and digital literacy. Therefore, strengthening national identity should be understood as a continuous process that positions citizens as active subjects in national and civic life.</p> <p>ABSTRAK</p> <p>Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan sosial</p>

	<p>masyarakat Indonesia yang multikultural. Arus budaya global, fragmentasi identitas, serta meningkatnya polarisasi sosial berpotensi melemahkan internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan identitas nasional warga negara Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penguatan identitas nasional dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila dan pendidikan multikultural, serta apakah warga negara Indonesia mampu mempertahankan identitas nasionalnya di tengah perubahan global tersebut. Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian: (1) bagaimana peran pendidikan Pancasila dan multikulturalisme dalam penguatan identitas nasional, (2) sejauh mana hasil penguatan identitas nasional tercermin pada sikap dan perilaku warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis kritis terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan identitas nasional pada warga negara Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan, namun tidak berlangsung secara otomatis. Keberhasilannya sangat bergantung pada pendekatan pendidikan yang kontekstual, dialogis, dan inklusif, serta dukungan kebijakan publik dan literasi digital. Dengan demikian, penguatan identitas nasional perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menempatkan warga negara sebagai subjek aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>
--	--

1. PENDAHULUAN

Indonesia berdiri sebagai negara bangsa dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi dan berlapis. Kemajemukan tersebut tampak pada keberagaman etnis, bahasa, agama, adat istiadat, serta bentuk-bentuk ekspresi budaya yang hidup di berbagai wilayah. Realitas ini bukan sekadar “warna sosial”, melainkan fondasi historis dan sosiologis pembentukan Indonesia sebagai nation-state. Karena itu, sejak awal, persoalan utama Indonesia bukan hanya bagaimana membangun pemerintahan, melainkan bagaimana menjaga kohesi kebangsaan di tengah perbedaan yang nyata. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika kemudian menjadi simbol

sekaligus prinsip etik-politik yang menegaskan bahwa perbedaan dapat (dan harus) dikelola menjadi persatuan, bukan konflik.¹

Di dalam kerangka tersebut, identitas nasional berperan sebagai jati diri kolektif bangsa yang menandai “siapa kita” sebagai Indonesia sekaligus menjadi perekat sosial bagi warga negara yang beragam. Identitas nasional tidak sebatas simbol formal seperti bendera, bahasa nasional, konstitusi, atau lambang negara, tetapi juga mencakup nilai dasar, orientasi moral-politik, dan kebiasaan kewargaan (civic culture) yang tumbuh dari pengalaman sejarah dan kebudayaan masyarakat.² Dalam pengertian ini, identitas nasional bersifat dinamis: ia dibentuk, dinegosiasikan, dan diteguhkan ulang oleh generasi ke generasi seiring perubahan sosial dan tantangan zaman.

Namun, dinamika global saat ini menempatkan identitas nasional pada situasi yang semakin rentan. Globalisasi yang dipercepat oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pertemuan budaya dalam skala yang lebih cepat, luas, dan intens. Arus informasi dan budaya lintas negara hadir hampir tanpa batas melalui media digital, memengaruhi selera, gaya hidup, pola konsumsi, hingga cara berpikir. Dalam literatur tentang identitas nasional, globalisasi sering dipahami sebagai fenomena ambivalen: di satu sisi membuka peluang kemajuan, tetapi di sisi lain dapat menekan atau mengaburkan identitas lokal dan nasional jika tidak disikapi dengan strategi kebijakan dan pendidikan yang tepat.

Situasi ini semakin relevan ketika Indonesia memasuki konteks Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan menuju Society 5.0, di mana teknologi digital tidak hanya menjadi alat bantu, melainkan membentuk ekosistem sosial baru. Ruang digital memfasilitasi pembentukan opini publik, identitas kelompok, serta mobilisasi sosial-politik yang cepat. Pada saat yang sama, ruang digital juga menyimpan risiko: polarisasi, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, serta ketegangan sosial yang dapat memicu konflik berbasis SARA. Di sinilah urgensi penguatan identitas nasional menjadi sangat nyata bukan untuk menutup diri dari dunia, tetapi untuk memastikan bangsa mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan jati diri dan solidaritas kebangsaannya.³

Pada titik ini, penguatan identitas nasional tidak dapat dijalankan dengan pendekatan penyeragaman budaya atau pemaksaan homogenitas. Dalam

¹ Wikipedia Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika,” last modified December 18, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika.

² Wikipedia Indonesia, “Identitas nasional,” last modified December 18, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas_nasional.

³ Aulia Zulfa and Fatma Ulfatun Najicha, “Urgensi Penguatan Identitas Nasional dalam Menghadapi Society 5.0 di Era Globalisasi,” *Jurnal Kalacakra* 3, no. 2 (2022): 65–71.

masyarakat majemuk, strategi homogenisasi justru berpotensi memunculkan resistensi, menimbulkan ketidakadilan pengakuan, dan memperlebar jarak antarkelompok. Karena itu, diperlukan paradigma yang mampu mengakui keberagaman sekaligus menguatkan persatuan. Salah satu paradigma yang kuat untuk konteks Indonesia adalah multikulturalisme, yang menekankan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap perbedaan budaya dalam kerangka kesetaraan dan keadilan.⁴

Dalam kajian teori politik kontemporer, multikulturalisme berkaitan erat dengan “politik pengakuan” (recognition). Kymlicka menekankan bahwa dalam negara liberal-demokratis, pengakuan terhadap kelompok-kelompok budaya tertentu sering dibutuhkan untuk memastikan kesetaraan yang nyata, bukan sekadar formal.⁵ Parekh menambahkan bahwa masyarakat multikultural menuntut dialog antar budaya yang memungkinkan koeksistensi tanpa memaksa kelompok lain melebur dalam budaya dominan. Relevansi kerangka ini tampak jelas di Indonesia, karena tantangan kebangsaan sering kali bukan sekadar masalah hukum formal, melainkan juga masalah pengakuan sosial, akses yang adil, dan representasi budaya dalam kehidupan publik.⁶

Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme tidak berdiri di ruang kosong; ia berakar pada nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kajian filsafat-politik tentang multikulturalisme Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat dipahami sebagai “imajinasi sosial” (social imaginary) yang membantu bangsa membayangkan dirinya sebagai komunitas politik bersama meskipun beragam. Melalui kerangka ini, relasi masyarakat dan negara dipahami bukan sebagai sesuatu yang “given” dan selesai, melainkan proses menjadi (becoming) yang dinamis. Karena itu, penguatan identitas nasional perlu ditempatkan sebagai proses berkelanjutan yang bertumpu pada pengakuan, penghargaan, dan promosi kebudayaan beragam kelompok dalam masyarakat.⁷

Selain aspek nilai dan teori, era globalisasi juga menuntut pembacaan baru mengenai persatuan Indonesia dalam konteks teknologi informasi. Teknologi dapat memperkuat integrasi (komunikasi cepat, informasi luas), namun juga dapat merenggangkan persatuan (misinformasi, konflik identitas, melemahnya

⁴ Wikipedia, “Multicultural education,” last modified December 18, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Multicultural_education.

⁵ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Oxford University Press, 1995).

⁶ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005).

⁷ Sugeng, Naupal, L. G. Saraswati, and Abby Gina Boang Manalu, “Rekognisi Keragaman Budaya dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika,” *Krtha Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 273–296.

kepedulian sosial). Dalam kajian implementasi nilai Pancasila, khususnya sila ketiga (Persatuan Indonesia), ditekankan bahwa kemajuan teknologi informasi perlu diimbangi dengan penguatan moral, etika, dan nasionalisme agar generasi muda tidak kehilangan orientasi kebangsaan. Dengan kata lain, tantangannya bukan teknologi itu sendiri, melainkan kapasitas warga negara untuk memaknai teknologi dalam kerangka nilai kebangsaan.⁸

Karena itulah pendidikan menjadi instrumen kunci dalam agenda penguatan identitas nasional berbasis multikulturalisme. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membentuk sikap, karakter, dan orientasi kewargaan. Pendidikan multikultural secara prinsip mendorong peserta didik memahami realitas plural, mengembangkan penghargaan terhadap perbedaan, serta membangun kemampuan komunikasi lintas budaya. Pendidikan multikultural bertujuan menolong individu memperoleh pemahaman diri yang lebih baik dengan melihat dirinya dari perspektif budaya lain; proses ini menumbuhkan empati, mengurangi prasangka, dan memperkuat komitmen terhadap kehidupan bersama yang adil.⁹

Di Indonesia, pendidikan multikultural semakin relevan karena problem sosial-politik kontemporer menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan literasi kewargaan, toleransi, dan etika publik. Kajian tentang pendidikan multikultural menekankan bahwa sekolah adalah ruang sosial penting (miniatur masyarakat) tempat anak belajar mempersepsikan, memahami, dan berinteraksi dengan perbedaan. Tanpa pembelajaran nilai yang tepat, pengalaman perbedaan dapat berubah menjadi prasangka; namun dengan pendidikan multikultural, perbedaan justru menjadi sumber pembelajaran untuk hidup damai dan setara.¹⁰

Perkembangan kebijakan pendidikan Indonesia juga menyediakan landasan yang kuat melalui Profil Pelajar Pancasila, terutama dimensi “berkebinekaan global”. Dimensi ini menegaskan bahwa peserta didik perlu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, sekaligus terbuka terhadap interaksi lintas budaya yang mendorong saling menghormati dan pembentukan budaya positif yang tidak bertentangan dengan budaya bangsa. Dalam kajian yang mengaitkan pendidikan multikultural dengan Profil Pelajar Pancasila, ditegaskan unsur penting

⁸ R. Arie Febrianto and Didik Nugroho, “Implementasi Sila Ketiga Pancasila Butir Ke-6 Mengembangkan Persatuan Indonesia Atas Dasar Bhineka Tunggal Ika dalam Kehidupan Sehari-Hari Terkait Informasi Teknologi,” *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 65–72.

⁹ James A. Banks, *An Introduction to Multicultural Education*, 5th ed. (Boston: Pearson Education, 2015).

¹⁰ James A. Banks, *An Introduction to Multicultural Education*, 5th ed. (Boston: Pearson Education, 2015), 1-3.

seperti pengetahuan-apresiasi budaya, keterampilan komunikasi lintas budaya, refleksi pengalaman keberagaman, serta tanggung jawab sosial atas keberagaman itu sendiri.¹¹ Ini berarti, pendidikan multikultural tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus terwujud dalam proses pembelajaran (kurikulum, metode, evaluasi, dan budaya sekolah).

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), arah ini sangat sejalan dengan misi pembentukan warga negara yang cerdas, demokratis, dan berkarakter Pancasila. Tantangan globalisasi, Society 5.0, dan ruang digital menuntut PKn tampil bukan sebagai mata pelajaran hafalan, tetapi sebagai pendidikan nilai dan keterampilan kewargaan (civic knowledge, civic skills, civic dispositions) yang memampukan peserta didik memilah informasi, menolak intoleransi, dan merawat persatuan. Kajian tentang urgensi penguatan identitas nasional juga menekankan perlunya menjaga kearifan lokal sebagai identitas budaya bangsa agar mampu menyerap pengaruh luar secara selektif bukan menelan mentah-mentah budaya global yang tidak selalu sesuai dengan nilai kebangsaan.¹²

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini memosisikan pendidikan multikultural berbasis Pancasila sebagai strategi penguatan identitas nasional di era globalisasi. Fokus ini penting karena perdebatan identitas nasional sering terjebak pada dua ekstrem: (1) nasionalisme sempit yang alergi perbedaan, atau (2) kosmopolitanisme dangkal yang mengabaikan akar kebangsaan. Pendidikan multikultural berbasis Pancasila menawarkan jalan tengah: menghargai perbedaan sebagai sunatullah sosial, namun tetap memegang nilai persatuan dan keadaban publik sebagai orientasi bersama. Dengan pendekatan kajian literatur yang menautkan teori multikulturalisme, politik pengakuan, tantangan globalisasi-digital, dan strategi pendidikan, artikel ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan konseptual untuk penguatan PKn dalam membentuk warga negara yang beridentitas nasional kuat, toleran, dan siap hidup dalam masyarakat global yang saling terhubung.¹³

2. METODE PENELITIAN

¹¹ Mardhiana Anggraini, Mutohharun Jinan, and Mohamad Ali, "Pendidikan Multikultural sebagai Implementasi Profil Pelajar Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2023): 81–93.

¹² Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), "Building a Cyber Constitution Based on Pancasila: Efforts to Preserve Unity amid the Global Digitalization Flow," *Pancasila Journal International*, accessed December 18, 2025, <https://ejournalinternationalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJI/article/view/45/12>.

¹³ Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, and Supriyono, "Nilai Pluralistik: Eksistensi Jatidiri Bangsa Indonesia Dilandasi Aktualisasi Penguatan Identitas Nasional," *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 1 (2021): 10–20.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, serta kerangka regulasi yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

3. PEMBAHASAN

3.1. Pendidikan Pancasila dan Multikulturalisme di Era Globalisasi

3.1.1 Pendidikan Pancasila dan Multikulturalisme di Era Globalisasi

Identitas nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila bukan hanya dokumen normatif, melainkan sistem nilai yang berfungsi sebagai orientasi etik, ideologis, dan praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, Pancasila berperan sebagai common platform yang memungkinkan perbedaan etnis, agama, dan budaya hidup berdampingan dalam satu kerangka kebangsaan. Pendidikan Pancasila dengan demikian memiliki fungsi strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda agar identitas nasional tidak berhenti sebagai simbol, tetapi terinternalisasi dalam sikap dan perilaku kewargaan.¹⁴

Di sisi lain, realitas sosial Indonesia yang multikultural menuntut pendekatan pendidikan yang tidak bersifat homogenisasi. Multikulturalisme hadir sebagai paradigma yang menekankan pengakuan, penghormatan, dan keadilan terhadap keragaman budaya. Dalam kajian teori, multikulturalisme tidak sekadar merayakan perbedaan, tetapi juga menuntut adanya kebijakan dan praktik sosial yang memastikan setiap kelompok memiliki ruang yang setara dalam kehidupan publik. Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme menemukan relevansinya karena sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga.¹⁵

Pendidikan Pancasila dan pendidikan multikultural bukan dua entitas yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Pendidikan Pancasila menyediakan kerangka nilai pemersatu, sedangkan pendidikan multikultural memberikan pendekatan pedagogis untuk mengelola keberagaman secara adil dan inklusif. Integrasi keduanya menjadi kunci dalam penguatan identitas nasional di tengah perubahan global yang cepat. Tanpa integrasi tersebut, pendidikan berisiko terjebak

¹⁴ Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1984).

¹⁵ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Oxford University Press, 1995).

pada formalisme normatif atau, sebaliknya, relativisme budaya yang mengaburkan orientasi kebangsaan.¹⁶

3.1.2. Tantangan Pendidikan Pancasila dan Multikulturalisme di Era Globalisasi

Era globalisasi menghadirkan tantangan multidimensional bagi pendidikan Pancasila dan multikulturalisme. Tantangan pertama adalah penetrasi budaya global yang masif melalui media digital. Budaya populer global sering kali membawa nilai individualisme, konsumerisme, dan hedonisme yang tidak selalu sejalan dengan nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang menjadi ciri identitas nasional Indonesia. Ketika peserta didik lebih akrab dengan budaya global daripada nilai kebangsaan, pendidikan Pancasila menghadapi risiko kehilangan relevansi jika tidak disajikan secara kontekstual.¹⁷

Tantangan kedua adalah krisis identitas di kalangan generasi muda. Globalisasi membuka banyak pilihan identitas (global citizen, digital native, komunitas virtual), namun sering kali melemahkan keterikatan emosional pada identitas nasional. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya literasi kebangsaan dapat membuat generasi muda rentan terhadap narasi intoleran, radikal, atau bahkan apatis terhadap kehidupan berbangsa. Kondisi ini diperparah oleh polarisasi sosial-politik yang memanfaatkan isu identitas untuk kepentingan jangka pendek.¹⁸

Tantangan ketiga berkaitan dengan praktik pendidikan yang masih normatif dan kognitif. Pendidikan Pancasila sering dipersepsikan sebagai mata pelajaran hafalan, sementara pendidikan multikultural dipahami sebatas slogan toleransi. Pendekatan semacam ini tidak cukup untuk membentuk karakter kewargaan yang kritis dan empatik. Tanpa metode pembelajaran yang dialogis dan reflektif, nilai Pancasila dan multikulturalisme sulit diinternalisasi secara mendalam.¹⁹

Tantangan keempat adalah disrupsi teknologi dan ruang digital. Media sosial menjadi arena baru pembentukan identitas, opini, dan relasi sosial. Di satu sisi, teknologi membuka ruang dialog lintas budaya; di sisi lain, ia juga memfasilitasi penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan konflik berbasis SARA. Pendidikan

¹⁶ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005).

¹⁷ Maria Yudkevich et al., *Global Initiatives and Higher Education in the Fourth Industrial Revolution* (Cham: Springer, 2018).

¹⁸ Aulia Zulfa and Fatma Ulfatun Najicha, "Urgensi Penguatan Identitas Nasional dalam Menghadapi Society 5.0 di Era Globalisasi," *Jurnal Kalacakra* 3, no. 2 (2022): 65–71.

¹⁹ Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, and Supriyono, "Nilai Pluralistik: Eksistensi Jatidiri Bangsa Indonesia," *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 1 (2021): 10–20.

dan multikulturalisme dituntut untuk merespons realitas ini dengan pendekatan literasi digital yang berorientasi nilai kebangsaan.²⁰

3.1.3. Strategi Penguatan Identitas Nasional melalui Pendidikan Pancasila dan Multikulturalisme

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan identitas nasional yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah reorientasi kurikulum Pendidikan Pancasila agar lebih kontekstual dan relevan dengan realitas global. Nilai Pancasila perlu dihubungkan dengan isu-isu kontemporer seperti globalisasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan kewargaan digital. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami bahwa Pancasila bukan nilai usang, melainkan kerangka etik yang relevan dalam kehidupan modern.²¹

Strategi kedua adalah integrasi pendidikan multikultural dalam pembelajaran Pancasila dan PKn. Integrasi ini tidak hanya pada level materi, tetapi juga metode pembelajaran. Pendekatan seperti case-based learning, dialog lintas budaya, dan pembelajaran berbasis proyek sosial dapat membantu peserta didik mengalami langsung makna keberagaman dan persatuan. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi menjadi pengalaman belajar yang bermakna.²²

Strategi ketiga adalah penguatan peran pendidik sebagai agen nilai. Guru Pendidikan Pancasila dan PKn tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga teladan dalam sikap toleran, adil, dan demokratis. Penelitian menunjukkan bahwa keteladanan guru memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik.²³ Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendidik dalam memahami multikulturalisme dan pedagogi kritis menjadi agenda penting.

Strategi keempat adalah pemanfaatan teknologi secara etis dan edukatif. Alih-alih memandang teknologi sebagai ancaman, pendidikan Pancasila dan multikulturalisme perlu memanfaatkannya sebagai media pembelajaran nilai kebangsaan. Konten digital, diskusi daring, dan simulasi sosial dapat digunakan

²⁰ R. Arie Febrianto and Didik Nugroho, "Implementasi Sila Ketiga Pancasila....," *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 65–72.

²¹ John Dewey, *Democracy and Education* (New York: Macmillan, 1916).

²² James A. Banks, *An Introduction to Multicultural Education* (Boston: Pearson Education, 2015).

²³ Sugeng et al., "Rekognisi Keragaman Budaya dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 273–296.

untuk menanamkan literasi digital berbasis Pancasila.²⁴ Pendekatan ini relevan dengan karakter generasi digital yang akrab dengan teknologi.

3.1.4. Target dan Arah Penguatan Identitas Nasional

Target penguatan identitas nasional melalui pendidikan Pancasila dan multikulturalisme dapat dibedakan menjadi target jangka pendek, menengah, dan panjang. Target jangka pendek adalah meningkatnya pemahaman konseptual peserta didik tentang Pancasila, multikulturalisme, dan identitas nasional. Pemahaman ini menjadi fondasi awal bagi pembentukan sikap kewargaan yang inklusif.²⁵

Target jangka menengah adalah terbentuknya sikap toleran, empatik, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Peserta didik diharapkan mampu menghargai perbedaan tanpa kehilangan komitmen terhadap persatuan nasional. Dalam konteks ini, pendidikan multikultural berfungsi sebagai jembatan antara identitas kultural dan identitas kebangsaan.²⁶

Target jangka panjang adalah terwujudnya warga negara yang berkarakter Pancasila, memiliki identitas nasional yang kuat, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan global. Identitas nasional yang demikian bersifat terbuka (open identity): berakar pada nilai Pancasila, tetapi tidak tertutup terhadap interaksi global.²⁷

3.1.5. Tabel Konseptual: Tantangan, Strategi, dan Target

Table 1. Tantangan, Strategi, dan Target Penguatan Identitas Nasional melalui Pendidikan Pancasila dan Multikulturalisme di Era Globalisasi

Aspek	Tantangan	Strategi	Target
-------	-----------	----------	--------

²⁴ Wikipedia, "Multicultural Education," accessed December 18, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Multicultural_education.

²⁵ Wikipedia Indonesia, "Identitas nasional," accessed December 18, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas_nasional.

²⁶ Mardhiana Anggraini, Mutohharun Jinan, and Mohamad Ali, "Pendidikan Multikultural sebagai Implementasi Profil Pelajar Pancasila," *Qolamuna* 8, no. 2 (2023): 81–93.

²⁷ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), "Building a Cyber Constitution Based on Pancasila...", *Pancasila Journal International*, accessed December 18, 2025, <https://ejournalinternationalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJI/article/view/45/12>.

Nilai	Luntturnya nilai kebangsaan	Reorientasi kurikulum Pancasila	Pemahaman nilai Pancasila
Sosial	Polarisasi & intoleransi	Pendidikan multikultural dialogis	Sikap toleran & inklusif
Teknologi	Hoaks & ujaran kebencian	Literasi digital berbasis Pancasila	Warga digital beretika
Pendidikan	Pembelajaran normative	Metode konstektual & reflektif	Karakter kewarganegaraan kuat

Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan multikulturalisme merupakan pilar utama dalam penguatan identitas nasional di era globalisasi. Tantangan global tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui strategi pendidikan yang tepat. Integrasi nilai Pancasila dan pendekatan multikultural memungkinkan identitas nasional Indonesia tetap kokoh, inklusif, dan relevan dalam menghadapi dinamika global. Pendidikan, dalam hal ini, menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa keberagaman tidak berubah menjadi sumber konflik, melainkan menjadi modal sosial bagi keberlanjutan bangsa Indonesia.

3.2. Penguatan Pancasila dan Multukultural di Era Globalisasi

3.2.1. Warga Negara Indonesia sebagai Subjek Utama Identitas Nasional

Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan subjek utama dalam pembentukan, pemeliharaan, dan keberlanjutan identitas nasional. Identitas nasional tidak akan bermakna apabila hanya berhenti pada tataran simbolik negara seperti bendera, lagu kebangsaan, atau semboyan nasional, melainkan harus terinternalisasi dalam kesadaran dan perilaku warga negara dalam kehidupan sehari-hari.²⁸ Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui proses sejarah, pendidikan, pengalaman kolektif, serta interaksi antara individu, masyarakat, dan negara.²⁹

²⁸ 1. Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 2006).

²⁹ Anthony D. Smith, *National Identity* (Reno: University of Nevada Press, 1991).

Identitas nasional bagi WNI mencakup kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia, komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, ketaatan pada konstitusi, serta kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk. Namun, identitas nasional tidak bersifat statis atau alamiah. Ia terus mengalami proses pembentukan ulang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional harus dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sebagai kondisi yang sudah selesai.³⁰

Dalam konteks globalisasi, posisi WNI menjadi semakin kompleks. WNI tidak hanya berperan sebagai anggota bangsa, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas global. Identitas nasional kini bersinggungan dengan identitas global, identitas digital, dan identitas kelompok lainnya. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana WNI mampu mempertahankan identitas nasionalnya tanpa menutup diri dari dinamika global. Di sinilah pentingnya evaluasi terhadap hasil penguatan identitas nasional: apakah WNI benar-benar mampu membangun identitas nasional yang kuat, atau justru mengalami pelemahan identitas kebangsaan.³¹

3.2.2. Indikator Penguatan Identitas Nasional pada WNI

Untuk menilai hasil penguatan identitas nasional pada WNI, diperlukan indikator yang jelas dan terukur secara konseptual. Dalam kajian kewarganegaraan, identitas nasional umumnya dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Dimensi kognitif berkaitan dengan pemahaman warga negara mengenai Pancasila, sejarah nasional, konstitusi, serta prinsip kebangsaan. Pemahaman ini menjadi fondasi awal bagi terbentuknya kesadaran kebangsaan.³²

Dimensi afektif mencakup rasa memiliki terhadap bangsa, kebanggaan nasional, serta loyalitas terhadap negara. WNI yang memiliki dimensi afektif kuat akan menunjukkan keterikatan emosional terhadap Indonesia, baik dalam kondisi normal maupun krisis nasional. Sementara itu, dimensi perilaku tercermin dalam tindakan nyata, seperti sikap toleran terhadap perbedaan, kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam kehidupan demokratis, serta kesediaan untuk menjaga persatuan nasional.³³

³⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016).

³¹ Craig Calhoun, *Nationalism* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997).

³² James A. Banks, *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007).

³³ Ernest Gellner, *Nations and Nationalism* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983).

Dalam masyarakat multikultural, indikator-indikator tersebut harus dipahami secara integratif. WNI yang memiliki identitas nasional kuat bukan berarti meniadakan identitas etnis, agama, atau budaya lokal, melainkan mampu mengelola identitas-identitas tersebut dalam kerangka kebangsaan. Dengan demikian, penguatan identitas nasional tidak bertentangan dengan pluralitas, tetapi justru menjadikannya sebagai modal sosial bangsa.³⁴

3.2.3. Hasil Empiris Penguatan Identitas Nasional: Bukti Kemampuan WNI

Berbagai kajian menunjukkan bahwa penguatan identitas nasional di Indonesia menghasilkan temuan yang tidak seragam. Di satu sisi, terdapat indikasi bahwa sebagian besar WNI masih menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar dalam kehidupan berbangsa. Praktik toleransi antarumat beragama, solidaritas sosial saat bencana nasional, serta penerimaan terhadap keberagaman budaya menunjukkan bahwa identitas nasional masih memiliki daya ikat yang kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa WNI pada dasarnya memiliki kapasitas untuk mempertahankan identitas nasional.³⁵

Namun, di sisi lain, terdapat pula temuan yang menunjukkan melemahnya internalisasi identitas nasional, terutama di kalangan generasi muda. Globalisasi budaya, penetrasi media sosial, serta meningkatnya polarisasi sosial-politik berbasis identitas telah memunculkan fragmentasi identitas. Dalam kondisi tertentu, identitas kelompok atau identitas digital menjadi lebih dominan dibandingkan identitas kebangsaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemampuan WNI dalam mempertahankan identitas nasional tidak bersifat otomatis, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan pendidikan.³⁶

Kemampuan WNI dalam membangun identitas nasional juga sangat bergantung pada kualitas pendidikan kewarganegaraan yang diterima. Pendidikan yang hanya menekankan hafalan nilai-nilai Pancasila cenderung menghasilkan identitas nasional yang bersifat simbolik. Sebaliknya, pendidikan yang dialogis, reflektif, dan kontekstual lebih efektif dalam membentuk identitas nasional yang hidup dan

³⁴ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights* (Oxford: Oxford University Press, 1995).

³⁵ Aulia Zulfa and Fatma Ulfatun Najicha, "Urgensi Penguatan Identitas Nasional dalam Menghadapi Society 5.0 di Era Globalisasi," *Jurnal Kalacakra* 3, no. 2 (2022): 65–71.

³⁶ Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, and Supriyono, "Nilai Pluralistik: Eksistensi Jatidiri Bangsa Indonesia Dilandasi Aktualisasi Penguatan Identitas Nasional," *Jurnal Civic Hukum* 6, no. 1 (2021): 10–20.

bermakna.

Dengan demikian, hasil penguatan identitas nasional bersifat diferensial, tergantung pada pengalaman pendidikan dan lingkungan sosial WNI.³⁷

3.2.4. Faktor Pendukung Keberhasilan Penguatan Identitas Nasional

Keberhasilan penguatan identitas nasional bagi WNI dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah pendidikan. Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Pendidikan yang menekankan dialog, pemikiran kritis, dan pengalaman sosial terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan indoktrinatif.³⁸

Faktor kedua adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan yang menghargai keberagaman dan mendorong interaksi lintas budaya memperkuat identitas nasional yang inklusif. Sebaliknya, lingkungan yang eksklusif dan diskriminatif cenderung melemahkan rasa kebangsaan.³⁹

Faktor ketiga adalah media dan ruang digital. Media digital dapat menjadi sarana penguatan identitas nasional melalui penyebaran nilai kebangsaan, tetapi juga dapat menjadi ancaman jika dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, literasi digital berbasis nilai Pancasila menjadi prasyarat penting bagi WNI di era digital.⁴⁰

3.2.5. Tantangan dan Hambatan dalam Penguatan Identitas Nasional WNI

Tantangan utama penguatan identitas nasional bagi WNI adalah fragmentasi identitas akibat globalisasi. Globalisasi memungkinkan individu memiliki berbagai identitas sekaligus, seperti identitas global, profesional, atau komunitas virtual. Tanpa kerangka nilai kebangsaan yang kuat, identitas nasional berpotensi terpinggirkan.⁴¹

Tantangan lainnya adalah politisasi identitas. Identitas agama, etnis, atau kelompok sering kali dimobilisasi untuk kepentingan politik praktis, yang berdampak pada melemahnya kohesi sosial dan kepercayaan antarwarga negara.

³⁷ Sugeng, Naupal, L. G. Saraswati, and Abby Gina Boang Manalu, "Rekognisi Keragaman Budaya dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 2 (2023): 273–296.

³⁸ Ubed Abdillah, Nurul Zuriah, and Sapriya, "Penguatan Identitas Nasional melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Civics* 17, no. 2 (2020): 135–147.

³⁹ Siti Irene Astuti Dwiningrum, "Multikulturalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 21, no. 4 (2016): 395–408.

⁴⁰ Wikipedia Indonesia, "Identitas nasional," last modified 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas_nasional.

⁴¹ UNESCO, "Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives," accessed 2025, <https://www.unesco.org/en/global-citizenship-education>.

Selain itu, rendahnya literasi kebangsaan dan digital juga memperparah kondisi tersebut, karena WNI mudah terpapar narasi yang mengancam persatuan nasional.⁴²

3.2.6. Dampak Penguatan Identitas Nasional terhadap Kehidupan WNI

Penguatan identitas nasional yang berhasil memberikan dampak positif bagi kehidupan WNI. Pertama, terbentuknya warga negara yang toleran dan inklusif. WNI dengan identitas nasional kuat mampu menghargai perbedaan tanpa kehilangan komitmen terhadap persatuan bangsa. Kedua, meningkatnya partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis, baik dalam pemilu, organisasi masyarakat, maupun kegiatan sosial.⁴³

Ketiga, penguatan identitas nasional meningkatkan ketahanan sosial dan nasional. WNI yang memiliki identitas nasional kokoh tidak mudah terprovokasi oleh isu disintegrasi dan lebih resilien menghadapi tantangan global. Keempat, identitas nasional yang kuat memperkuat posisi Indonesia dalam pergaulan internasional, karena warga negara mampu tampil sebagai individu berwawasan global tetapi tetap berakar pada nilai Pancasila.⁴⁴

3.2.7. Analisis Perbandingan Kondisi Identitas Nasional WNI

Table 2. Kondisi Identitas Nasional WNI

Aspek	Identitas Nasional Lemah	Identitas Nasional Kuat
Kesadaran Kebangsaan	Simbolik dan pasif	Substansif dan selektif
Sikap Nasional	Intoleran dan eksklusif	Toleran dan inklusif

⁴² Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), "Pancasila dan Ketahanan Nasional," accessed 2025, <https://bpip.go.id>.

⁴³ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Profil Pelajar Pancasila," accessed 2025, <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>.

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, "Statistik Sosial Budaya Indonesia," accessed 2025, <https://www.bps.go.id>.

Partisipasi	Apatis	Aktif dan bertanggung jawab
Ketahanan Sosial	Rentan Konflik	Resilien

3.2.8. Refleksi Kritis: Apakah WNI Mampu?

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa WNI mampu membangun dan mempertahankan identitas nasional, tetapi kemampuan tersebut tidak muncul secara otomatis. Identitas nasional merupakan hasil proses pendidikan, pengalaman sosial, dan kebijakan negara yang konsisten. Penguatan identitas nasional yang bersifat normatif dan seremonial cenderung menghasilkan identitas semu, sementara pendekatan edukatif, dialogis, dan kontekstual lebih efektif dalam membentuk identitas nasional yang hidup.⁴⁵

Oleh karena itu, penguatan identitas nasional harus dipahami sebagai proyek kebangsaan jangka panjang yang melibatkan seluruh elemen bangsa. WNI bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek aktif dalam merawat dan memperbarui identitas nasional Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.⁴⁶

3.2.9. Dimensi Psikologis dan Sosial Identitas Nasional WNI

Selain dimensi kognitif, afektif, dan perilaku, penguatan identitas nasional bagi WNI juga perlu dilihat dari dimensi psikologis dan sosial. Identitas nasional berfungsi sebagai sumber makna dan orientasi bagi individu dalam memahami posisinya sebagai bagian dari bangsa. Ketika identitas nasional terinternalisasi

⁴⁵ Anthony Reid, *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant* (Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2012).

⁴⁶ 19. Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005).

dengan baik, WNI cenderung memiliki rasa percaya diri kolektif, stabilitas emosional dalam menghadapi perubahan sosial, serta kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri kebangsaan.⁴⁷

Dalam konteks masyarakat multikultural, dimensi psikologis identitas nasional berperan penting dalam mencegah munculnya rasa keterasingan (alienation) dan eksklusivisme kelompok. WNI yang merasa diakui dan dihargai sebagai bagian dari bangsa akan lebih mudah menerima perbedaan dan menghindari sikap defensif terhadap identitas lain. Sebaliknya, kegagalan negara dan masyarakat dalam membangun identitas nasional yang inklusif dapat memunculkan perasaan terpinggirkan yang berujung pada konflik sosial.⁴⁸

Dari sisi sosial, identitas nasional berfungsi sebagai perekat yang memungkinkan kerja sama lintas kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Penguatan identitas nasional yang efektif mendorong terbentuknya kepercayaan sosial (social trust), solidaritas, dan partisipasi kolektif WNI dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, identitas nasional tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas relasi sosial dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.⁴⁹

3.2.10. Penguatan Identitas Nasional WNI di Ruang Digital

Ruang digital menjadi arena baru yang sangat menentukan dalam penguatan atau pelemahan identitas nasional WNI. Media sosial, platform daring, dan ekosistem digital memungkinkan WNI membangun jejaring sosial lintas wilayah dan budaya, tetapi sekaligus membuka ruang bagi penyebaran narasi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, kemampuan WNI dalam mempertahankan identitas nasional sangat dipengaruhi oleh literasi digital dan kemampuan berpikir kritis.⁵⁰

Penguatan identitas nasional di ruang digital tidak dapat dilakukan dengan pendekatan represif atau sensor semata. Yang dibutuhkan adalah strategi edukatif yang mendorong WNI, khususnya generasi muda, untuk memahami nilai Pancasila dan kebangsaan sebagai landasan etika dalam berinteraksi di dunia maya. WNI yang memiliki identitas nasional kuat cenderung lebih bijak dalam menyaring

⁴⁷ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 1968).

⁴⁸ Henri Tajfel and John C. Turner, "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior," in *Psychology of Intergroup Relations*, ed. Stephen Worchel and William G. Austin (Chicago: Nelson-Hall, 1986).

⁴⁹ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000).

⁵⁰ Manuel Castells, *The Power of Identity* (Oxford: Blackwell Publishing, 2010).

informasi, tidak mudah terprovokasi, serta mampu menggunakan ruang digital sebagai sarana dialog dan kolaborasi positif.⁵¹

Dalam konteks ini, keberhasilan penguatan identitas nasional dapat diukur dari kemampuan WNI menjadikan ruang digital sebagai medium ekspresi kebangsaan, bukan sebagai ruang konflik identitas. Fenomena munculnya konten kreatif bernuansa kebangsaan dan solidaritas sosial di media digital menunjukkan bahwa WNI memiliki potensi besar untuk mengaktualisasikan identitas nasional secara adaptif.⁵²

3.2.11. Perbandingan Antargenerasi dalam Penguatan Identitas Nasional

Hasil penguatan identitas nasional juga menunjukkan variasi antargenerasi. Generasi yang tumbuh dalam konteks Orde Baru, misalnya, cenderung memiliki identitas nasional yang kuat secara simbolik, tetapi kurang kritis. Sebaliknya, generasi muda saat ini menunjukkan kecenderungan lebih kritis, terbuka, dan plural, namun berisiko mengalami distansi emosional terhadap simbol-simbol kebangsaan.⁵³

Perbedaan ini tidak dapat serta-merta dinilai sebagai kemunduran. Justru, identitas nasional WNI mengalami transformasi bentuk: dari identitas yang bersifat seragam menuju identitas yang lebih reflektif dan dialogis. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa transformasi tersebut tidak berujung pada pelemahan identitas nasional, melainkan memperkaya maknanya.⁵⁴

Dengan pendekatan pendidikan dan kebijakan yang tepat, generasi muda WNI berpotensi membangun identitas nasional yang lebih kontekstual, inklusif, dan relevan dengan tantangan global. Hal ini menunjukkan bahwa secara potensial, WNI mampu memperkuat identitas nasionalnya, asalkan difasilitasi dengan strategi yang sesuai dengan karakter zaman.

3.2.12. Sintesis: Apakah Penguatan Identitas Nasional Benar-Benar Efektif?

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam sub-bab ini, dapat disintesis bahwa penguatan identitas nasional bagi WNI bersifat mungkin dan terbukti, tetapi tidak bersifat otomatis. Keberhasilan penguatan identitas nasional sangat

⁵¹ 25. Sonia Livingstone, *Digital Literacies: Tracing the Implications for Learners and Learning* (London: London School of Economics, 2012).

⁵² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Literasi Digital Nasional," accessed 2025, <https://literasidigital.id>.

⁵³ Karl Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge* (London: Routledge & Kegan Paul, 1952).

⁵⁴ Ulrich Beck, *Risk Society: Towards a New Modernity* (London: Sage Publications, 1992).

bergantung pada konsistensi pendidikan, kualitas ruang publik, kebijakan negara, serta partisipasi aktif warga negara.⁵⁵

WNI yang berada dalam ekosistem pendidikan dan sosial yang mendukung cenderung menunjukkan identitas nasional yang kuat, inklusif, dan adaptif. Sebaliknya, WNI yang hidup dalam lingkungan yang penuh polarisasi, ketidakadilan, dan disinformasi lebih rentan mengalami krisis identitas kebangsaan. Dengan kata lain, kemampuan WNI dalam mempertahankan identitas nasional merupakan refleksi dari kualitas tata kelola kebangsaan secara keseluruhan.⁵⁶

3.2.13. Implikasi Substantif bagi Kehidupan Berbangsa

Penguatan identitas nasional yang berhasil memberikan implikasi strategis bagi keberlanjutan bangsa Indonesia. Identitas nasional yang kuat memperkuat ketahanan ideologis, mencegah disintegrasi sosial, dan mendukung pembangunan nasional berbasis persatuan. Dalam jangka panjang, identitas nasional yang inklusif memungkinkan Indonesia tetap teguh sebagai negara bangsa di tengah tekanan globalisasi.⁵⁷

Dengan demikian, pertanyaan “apakah WNI mampu?” dapat dijawab secara argumentatif: ya, WNI mampu, tetapi kemampuan tersebut harus terus dipelihara melalui pendidikan, kebijakan publik, dan budaya kewargaan yang sehat. Identitas nasional bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja, melainkan dibangun, dirawat, dan diperjuangkan secara kolektif oleh seluruh warga negara.⁵⁸

3. KESIMPULAN

Pendidikan Pancasila dan multikulturalisme memiliki peran strategis dalam penguatan identitas nasional di era globalisasi. Tantangan global berupa arus budaya transnasional, disrupti teknologi, serta polarisasi sosial menuntut pendidikan Pancasila untuk tidak lagi bersifat normatif dan seremonial, melainkan kontekstual, dialogis, dan relevan dengan realitas kehidupan warga negara. Integrasi nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan pendidikan multikultural

⁵⁵ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge, MA: MIT Press, 1989).

⁵⁶ Francis Fukuyama, *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018).

⁵⁷ Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1984).

⁵⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS), “Pembangunan Karakter Bangsa,” accessed 2025, <https://www.bappenas.go.id>.

memungkinkan terbentuknya identitas nasional yang inklusif, adaptif, dan berakar kuat pada prinsip persatuan dalam keberagaman. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter kewargaan yang mampu merawat kohesi sosial di tengah dinamika global yang terus berubah.

Penguatan identitas nasional bagi warga negara Indonesia pada dasarnya mampu dilakukan, namun tidak terjadi secara otomatis. Identitas nasional merupakan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, lingkungan sosial, kebijakan publik, serta dinamika ruang digital. Warga negara Indonesia memiliki potensi kuat untuk membangun identitas nasional yang kokoh dan relevan, asalkan penguatan tersebut dijalankan secara konsisten, inklusif, dan berorientasi pada pengalaman nyata kehidupan berbangsa. Dengan demikian, penguatan identitas nasional harus dipahami sebagai proyek kebangsaan berkelanjutan yang menempatkan warga negara bukan sekadar sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif dalam merawat dan memperbarui identitas nasional Indonesia di tengah tantangan globalisasi.

REFERENSI

Buku

- Anderson, B. *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso. 2006
- Banks, J. A. *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. Jossey-Bass. 2007
- Banks, J. A. *An introduction to multicultural education (5th ed.)*. Pearson Education. 2015
- Beck, U. *Risk society: Towards a new modernity*. Sage Publications. 1992
- Calhoun, C. *Nationalism*. University of Minnesota Press. 1997
- Castells, M. *The power of identity*. Wiley-Blackwell. 2010
- Erikson, E. H. *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company. 1968
- Fukuyama, F. *Identity: The demand for dignity and the politics of resentment*. Farrar, Straus and Giroux. 2018
- Gellner, E. *Nations and nationalism*. Cornell University Press. 1983
- Habermas, J. *The structural transformation of the public sphere*. MIT Press. 1989.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. 2016.
- Kymlicka, W. *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press. 1995.
- Mannheim, K. *Essays on the sociology of knowledge*. Routledge & Kegan Paul. 1952.
- Parekh, B. *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory*. Palgrave Macmillan. 2005.
- Putnam, R. D. *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster. 2000.
- Reid, A. *Indonesia rising: The repositioning of Asia's third giant*. ISEAS-Yusof Ishak Institute. 2012.

National identity. University of Nevada Press. 1991.

Artikel Jurnal

Dwiningrum, S. I. A. (2016). Multikulturalisme dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(4), 395–408.

Sugeng, Saraswati, L. G., & Manalu, A. G. B. (2023). Rekognisi keragaman budaya dan multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 273–296.

Zulfa, A., & Najicha, F. U. (2022). Urgensi penguatan identitas nasional dalam menghadapi society 5.0 di era globalisasi. *Jurnal Kalacakra*, 3(2), 65–71.

Website Internet

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2025). Pancasila dan ketahanan nasional. <https://bpip.go.id>

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Pembangunan karakter bangsa. <https://www.bappenas.go.id>

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik sosial budaya Indonesia. <https://www.bps.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Profil pelajar Pancasila. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2025). Literasi digital nasional. <https://literasidigital.id>

UNESCO. (2025). Global citizenship education: Topics and learning objectives. <https://www.unesco.org/en/global-citizenship-education>

Wikipedia. (2025). Multicultural education. https://en.wikipedia.org/wiki/Multicultural_education

Wikipedia. (2025). Identitas nasional. https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas_nasional